

PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*
PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN
2024



Diajukan oleh:
Gratio Emba Rombelayuk Djawa

NPM : 210514355
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan Dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*
PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA TAHUN 2024



Diajukan oleh :

Gratio Emba Rombelayuk Djawa

NPM : 210514355
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan Dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 30 Juni 2025

B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.

Tanda Tangan

:

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*
PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA TAHUN 2024



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Juli 2025
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum.
Sekretaris : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.
Anggota : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum

Tanda Tangan
(.....)
(.....)
(.....)

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika legal memorandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi menurut hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Juni 2025

Yang menyatakan



Gratio Emba Rombelayuk Djawa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan Legal Memorandum ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan ini disusun sebagai bentuk analisis hukum yang objektif dan sistematis terhadap isu hukum tertentu yang relevan dalam praktik ketatanegaraan dan administrasi pemerintahan, khususnya dalam konteks netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun Legal Momerandum ini dibuat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, beserta jajarannya dan kepada B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Legal Momerandum penulis. Penulis juga menyadari bahwa terdapat banyaknya dukungan dari berbagai pihak pula dalam penulisan Legal Momerandum ini. Maka oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Mama Vivien, Mama Vitha, Papa Arief, Papa Pedy, Kakak Vinanda tercinta, yang telah memberikan dukungan materi, doa, dan mental, serta membuat penulis merasa harus bertanggung jawab menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini, sebagai bukti bahwa semua dukungan yang telah diberikan tidak sia-sia.

2. Keluarga besar penulis, yaitu keluarga dari Mama dan Papa, yang telah memberi masukan, selalu mendoakan dari jauh, dan memberi dukungan moral;
3. Rekan-rekan satu angkatan, yang telah memberikan masukan, selalu mendoakan, dan memberi dukungan moral;
4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menempa penulis dengan cara memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, selama penulis menempuh Pendidikan formal di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
5. Teman-teman penulis Retno Saputra, Gunawan, Adi Pande, Made Tresna, Gabriel Umbas, Gabriel Deka, Mhd. Yogi Caesar dan Daniel Siahaan yang telah memberikan dukungan moral dan saling bertukar pendapat pada saat mengerjakan, baik *Legal Memorandum* maupun *Skripsi*. Oliver Sihotang dan Rizal Simanjuntak walaupun tidak sedang menyusun, tetapi ikut juga untuk menemani penulis dalam mengerjakan *Legal Memorandum* ini.
6. Saudara- saudara terkasih Keluarga Khongguan yang tidak bisa disebut satu-persatu yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan moral dan saling berbagi ilmu selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa memorandum ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Abstract

This legal memorandum examines an alleged violation of the principle of civil servant neutrality committed by a government official in North Toraja Regency during the 2024 Regional Head Election (Pilkada). The case highlights the involvement of a civil servant in political activities, including attending a candidate's declaration event, wearing campaign attributes, and allegedly influencing subordinates to support a particular candidate. Through an analysis based on primary and secondary legal materials, this study concludes that such actions constitute a serious breach of the neutrality principle. The memorandum recommends the imposition of strict disciplinary sanctions in accordance with applicable regulations. It also emphasizes the importance of strengthening oversight mechanisms and the continuous internalization of neutrality values within the public bureaucracy. Upholding the neutrality of civil servants is not only a legal obligation but also a moral foundation essential for preserving democratic integrity and maintaining public trust in government institutions.

Keywords: *Civil Servant Neutrality, Pilkada 2024, Political Activities, Disciplinary Sanctions, Public Trust, Normative Juridical Approach, Government Regulation No. 94/2021.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I KASUS POSISI	1
A. Fakta Hukum	1
BAB II PERTANYAAN HUKUM	3
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM	4
A. Bahan Hukum Primer	4
B. Bahan Hukum Sekunder	8
BAB IV ANALISIS HUKUM	11
A. Netralitas Aparatur Sipil Negara	11
B. Bentuk pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2024	14

C. Sanksi yang dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melanggar netralitas di dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024	20
BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM	29
A. Pendapat Hukum	29
B. Rekomendasi Hukum	30
DAFTAR PUSTAKA	32